

Pakar Hukum Apresiasi
Kejagung Tetapkan
PT. CNI Tersangka
Korupsi Nikel
Halaman 11

Kunjungi Bangkalan,
Kepala BP Taskin
Tegaskan Komitmen
Pengentasan Kemiskinan
Halaman 11

Indonesia vs
Malaysia:
Berebut 3 Poin
Krusial
Halaman 12

SENIN
28 SEPTEMBER 2026
Rp 15.000
TERBIT SORE
www.harian-merdeka.com

HARIAN MERDEKA

— ASPIRASI RAKYAT

POLISI SEDANG SELIDIKI

Siswi Insan Cendekia Madani Diduga Dilecehkan Gurunya

TANGSEL | **Harian Merdeka** – Polres Tangerang Selatan menyelidiki dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswi berusia 13 tahun yang diduga dilakukan tenagr pengajar (oknum guru) sekolah Insan Cendikia Madani, Serpong, Tangerang Selatan, Banten.

Halaman 11

GARIS POLISI

Jokowi Gabung PSI, Sekjen Golkar: Mudah Ditebak karena Ada Kaesang

JAKARTA | **Harian Merdeka**



Keputusan Mantan Presiden Jokowi akhirnya memutuskan untuk berlabuh ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendapat tanggapan dari Partai Golkar.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menilai manuver tersebut sebagai hal yang lumrah dan merupakan bagian dari hak politik Jokowi.

“Ya enggak apa-apa. Itu hak politik Pak Jokowi,” ujar Sarmuji menanggapi status baru mantan Kepala Negara tersebut.

Menurut Sarmuji, pilihan politik Jokowi untuk bergabung dengan PSI bukanlah sebuah kejutan. Ia menilai langkah tersebut sangat mudah diperkirakan, mengingat hubungan keluarga.

Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, saat ini menduduki posisi sebagai Ketua Umum di partai berlambang mawar tersebut.

“Lagian anak beliau kan Ketua Partai PSI. Jadi itu sesuatu yang mudah diperkirakan,” tambahnya.

Di sisi lain, fakta baru mengenai keanggotaan Jokowi di PSI turut terungkap. Meski baru resmi mengumumkannya di Bandung dan memamerkan Kartu Tanda Anggota (KTA) secara terang-terangan di Kabupaten Bekasi pada akhir pekan ini, Jokowi ternyata telah resmi berstatus sebagai kader PSI sejak Oktober 2025.

Dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI Kabupaten Bekasi, Jokowi merespons rasa penasaran publik mengenai keputusannya yang sengaja merahasiakan KTA tersebut selama hampir setahun. Dengan gaya santainya, ia menyebut bahwa hal ini murni karena persoalan momentum politik.

“Banyak yang bertanya, kok baru ditunjukkan sekarang? Ya kan suka-suka saya dong, kan ini kartu milik saya. Bahwa saya tunjukkan di Bandung dan Bekasi ini, karena momentumnya memang sekarang,” tegas Jokowi. ● (Egi)

Survei INES: Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo Tembus 79,3 Persen

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Hasil survei Indonesia Network Election Survey (INES) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,3 persen menjelang dua tahun pemerintahan.

Direktur Eksekutif INES Andri Gunawan mengatakan sebanyak 17,4 persen responden menyatakan kurang atau tidak puas terhadap kinerja Prabowo, sementara 3,3 persen lainnya tidak memberikan jawaban.

Survei INES juga mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo berada di angka 82,1 persen. Sebanyak 16,5 persen responden menyatakan kurang atau tidak percaya, sedangkan 1,4 persen tidak menjawab.

Dalam sejumlah bidang kebijakan, survei mencatat tingkat kepuasan publik masih relatif tinggi. Sebanyak 78,2 persen responden mengapresiasi keberanian, ketegasan, serta kecepatan eksekusi program-program yang dinilai pro-rakyat.

Sementara itu, sebanyak 78,3 persen responden menilai kondisi politik Indonesia dalam keadaan stabil dan baik. Sebanyak 18,6 persen menilai kondisi politik buruk dan tidak stabil, sedangkan 3,1 persen tidak memberikan penilaian.

Di bidang diplomasi, sebanyak 80,3 persen responden menyatakan puas dan percaya terhadap strategi diplomasi Presiden Prabowo yang dini-



lai membawa agenda penguatan ekonomi Indonesia sebagai prioritas dalam berbagai lawatan ke luar negeri.

Survei juga mencatat 78,2 persen responden menyatakan puas atau cukup puas terhadap pemberantasan korupsi. Sementara terkait kebebasan berpendapat, tingkat kepuasan mencapai 81,2 persen.

Untuk penanganan kemiskinan, sebanyak 68,2 persen responden menyatakan puas atau cukup puas. Adapun terhadap program kesejahteraan sosial dan bantuan sosial, tingkat kepuasan mencapai 78,7 persen.

Namun, sektor ekonomi rakyat masih menjadi tantangan pemerintah. INES mencatat persoalan sulitnya memperoleh lapangan kerja dan tingginya harga kebutuhan pokok menjadi perhatian masyarakat.

Sebanyak 50,7 persen responden menyatakan kurang puas terhadap penanganan persoalan lapangan kerja. Sementara 54,8 persen responden mengeluhkan tingginya harga

kebutuhan pokok.

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan mayoritas responden. Sebanyak 78,2 persen warga menyatakan setuju agar program tersebut dilanjutkan.

Sebanyak 18,4 persen responden menyatakan tidak setuju program MBG dilanjutkan, sedangkan 3,4 persen tidak menjawab.

Menurut INES, hasil tersebut menunjukkan program MBG masih memiliki relevansi dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Survei INES dilakukan di 36 provinsi dengan jumlah responden sebanyak 1.400 orang. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar $\pm 2,48$ persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil survei tersebut disampaikan INES pada 26 September 2026 sebagai gambaran persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo menjelang dua tahun masa pemerintahan. ● (Egi)

Redaksi **MERDEKA**

Diterbitkan Oleh : PT.JAKARTA RAYA PERS

Pemimpin Umum : Helmy Halim, Pemimpin Perusahaan : Alan Oskar, Wakil Pemimpin Perusahaan : Verencia Mercy, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Helmy Halim, Wakil Pemimpin Redaksi : Abdul Rohman, Redaktur Eksekutif : Egi Hendrawan, Redaktur Pelaksana : Agus Irawan, Redaktur : Andri Achdiat, Budi Santoso, Taufik, Saepudin, Adam Kamal, Reporter : Aceng Abidin, Ahmad Baladi, Sahrul, Robi Liu, Prayitno, Edi.ST, Nurziman, Rafiudin, Abdul Aziz, Siti Marko, RA. Sudrajat, Syarif Hidayat, Irwani Heliawan, Abidin, Hasuri, Mukhtar, Jan Zarian, Juli Rabiati, H.Mulyadi, Didit, Daenk, Ali.R., Kabirol Medan : Umar, S.Pd.I Perwakilan Nias (Sumut) Adi Laoli, Sekretaris Redaksi : Syafina Azzahra, Keuangan : Yosefin Arwinda Devi, Manager Iklan : Muksin, P.Adi, Iklan : S Fajar, Wilki Irawan, Pemasaran : Hendro, Anwar, Saunan, Agus Black, Dian, Layout : Bobby Saputra, Fuad, IT Web : Walid, Amel, Bagian Umum/OB : Wawan, Penasehat Hukum : Hanafi Tanawijaya, SH, Dedi Suryadi. SH

Kantor Usaha/Redaksi : Rukan Golden Fatmawati, Jl.RS Fatmawati G-34 No.15 RT.008 RW.006, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. NO. REK. BANK MANDIRI KCP JAKARTA KEMENDIKBUD 1220011807917 a/n JAKARTA RAYA PERS.Telp:081212262686

Kantor Perwakilan : Ruko ModernLand Blok R 30, Jalan Hartono Raya Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Telepon : (021) 59728637. (isi di luar tanggungjawab percetakan)

Wacana Syarat Capres Dua Fraksi, Ketum PPP Minta Suara Rakyat Tak Diingkari

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Wacana pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) harus mendapat dukungan minimal dua fraksi di DPR mulai mendapat tanggapan dari partai politik. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono mengingatkan agar perubahan aturan pencalonan tidak kembali mempersempit ruang keterwakilan politik.

Mardiono menilai pemilu merupakan bagian penting dari pelaksanaan demokrasi karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Karena itu, menurutnya, setiap perubahan aturan harus tetap memastikan hak politik masyarakat terakomodasi.

“Di dalam demokrasi diletakkan kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat yang harus berdaulat. Oleh karena itu, tidak boleh ada rakyat yang tidak terakomodasi dalam hak-hak politik dalam demokrasinya,” kata Mardiono usai kegiatan PPP Muda (P3Muda) di Yogyakarta, Sabtu (26/9/2026) malam.

Ia menilai wacana kewajiban dukungan minimal dua fraksi DPR perlu dikaji secara hati-hati. Menurut Mardiono, aturan tersebut jangan sampai kembali menciptakan hambatan bagi partai politik dalam mengusulkan pasangan capres-cawapres.

Mardiono juga menyinggung ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

Menurut dia, perubahan aturan pencalonan harus tetap menjaga agar suara yang telah diberikan masyarakat melalui pemilu memiliki jalur menuju keterwakilan politik.

Ia kemudian mencontohkan hasil Pemilu 2024 yang menurutnya menghasilkan lebih dari 17 juta suara yang telah diberikan melalui proses pemilu dan dibiayai negara. Mardiono mempertanyakan apabila suara tersebut pada akhirnya tidak memiliki keterwakilan politik dalam pencalonan kepemimpinan nasional.



“Nah, ini ada ketidakadilan dalam demokrasi. Ini termasuk pengingkaran dari kedaulatan yang disebut ada di tangan rakyat itu. Itu yang perlu dicatat,” ujarnya.

Mardiono mengaitkan persoalan tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur presidential threshold berten-

tangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan itu menghapus ketentuan ambang batas persentase dukungan bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan capres-cawapres. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan rezim presidential threshold, berapa pun persentasenya, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

● (Egi)

Ketua Komisi XIII DPR Dorong Literasi Jadi Variabel Remisi Warga Binaan

BANDUNG |
Harian Merdeka

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengusulkan agar kemampuan membaca dan menulis menjadi salah satu variabel dalam pengurangan masa tahanan bagi warga binaan. Menurutnya, literasi dapat menjadi ruang konversi dari regulasi menuju proses pembinaan yang lebih produktif dan manusiawi.

Hal itu disampaikan Willy dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, Jawa Barat, Jumat (25/9/2026). Ia mengatakan, gagasan tersebut merupakan bagian



dari gerakan literasi yang perlu dikembangkan di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

“Saya sudah sampaikan di dalam rapat kerja bersama menteri bahwasannya pengurang masa tahanan itu salah satu variabelnya adalah sebanyak apa orang sudah membaca dan menamatkan buku,

yang kedua sejauh apa orang bisa menulis,” kata Politisi Fraksi Partai Nas-Dem tersebut.

Menurutnya, pembinaan warga binaan tidak seharusnya berhenti pada kepatuhan terhadap aturan. Sistem pemasyarakatan juga perlu memberikan ruang bagi warga binaan

untuk mengembangkan kemampuan dan menghasilkan karya sebagai bagian dari proses reintegrasi ke masyarakat.

“Sebuah regulasi harus dibikinkan ruang konversi. Apa ruang konversinya? Yaitu ruang membaca dan menulis. Kita kembali ke hal yang paling basic,” ujar Legislator Dapil Jawa Timur XI itu.

Willy menilai, sejarah menunjukkan bahwa penjara tidak selalu menjadi penghalang bagi seseorang untuk menghasilkan karya besar. Ia mencontohkan sejumlah tokoh yang menghasilkan karya ketika berada di dalam penjara.

“Kalau mau melihat sejarah, karya-karya besar

yang ditulis oleh orang-orang besar itu rata-rata dari dalam penjara. Kita lihat bagaimana Nelson menulis dari dalam penjara, kita melihat bagaimana Tan Malaka menulis, Bung Karno menulis, Antonio Gramsci menulis, bahkan secara spesifik Antonio Gramsci menulis tentang penjara,” katanya.

Ia juga menyinggung Buya Hamka yang menyelesaikan karya tafsir Al-Qur'an ketika menjalani masa tahanan. Menurut Willy, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa ruang pemasyarakatan juga dapat menjadi tempat tumbuhnya produktivitas dan pemikiran.

● (Egi)



Gandeng MPR RI, KWP Komitmen Perluas Pemahaman Konstitusi Lewat Jurnalisme

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Ariawan menilai MPR RI memiliki posisi strategis dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan konstitusi di tengah dinamika kehidupan bernegara.

Dalam sambutannya pada kegiatan Media Gathering MPR RI, Ariawan menekankan peran tersebut penting terus dipahami karena MPR RI tidak hanya berkaitan dengan aktivitas politik di Parlemen, tetapi juga memiliki mandat kebangsaan yang melekat pada kelembagaannya.

"MPR RI memiliki tugas penting sebagai penjaga konstitusi dan kebangsaan," kata Ariawan dalam pidatonya pada acara Media Gathering MPR RI, Senin (28/9).

Pernyataan ini menjadi salah satu yang dianggap penting untuk dipahami terkait posisi dan peran MPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Ariawan mengatakan dimensi kebangsaan yang melekat pada MPR perlu terus dikomunikasikan kepada masyarakat melalui pemberitaan yang informatif dan mudah dipahami.

"Pemberitaan mengenai MPR tidak hanya menyampaikan kegiatan, tetapi juga harus membantu masyarakat memahami peran kelembagaan MPR," ujarnya.

Karena itu, Ariawan menilai wartawan Parlemen mempunyai peran penting dalam menghadirkan pemberitaan yang mampu menjelaskan kerja MPR secara lebih utuh.

"KWP dapat ikut menyampaikan informasi mengenai tugas MPR kepada masyarakat melalui pemberitaan yang profesional," ucapnya.

Dia menambahkan sinergi antara KWP dan MPR RI tetap diperlukan agar informasi mengenai konstitusi, kebangsaan, serta kerja kelembagaan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

"Sinergitas KWP dan MPR dalam pemberitaan harus terus dibangun dengan tetap berpegang pada kaidah jurnalistik," ujar Ariawan. Ariawan berharap pemberitaan mengenai MPR RI dapat memperluas ruang edukasi publik mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya terkait konstitusi. ● (Egi)

ASN Meninggal Saat Latihan Komcad, TB Hasanuddin Desak Evaluasi Total



JAKARTA |
Harian Merdeka

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyoroti meninggalnya seorang aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Ekonomi Kreatif ketika mengikuti pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) ASN Gelombang II.

ASN bernama Vanreko Varkas Bagaskara (28) meninggal dunia pada 25 September 2026. Berdasarkan informasi yang diterima, Vanreko terjatuh saat mengikuti gladi persiapan penutupan pendidikan Komcad ASN.

TB Hasanuddin menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Ia meminta kejadian tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan, serta dievaluasi secara menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang.

"Kejadian meninggalnya peserta dalam pelaksanaan latihan militer perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, khususnya Kementerian

“Kejadian meninggalnya peserta dalam pelaksanaan latihan militer perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan. Penyebab kejadian harus diperiksa secara transparan dan menyeluruh,”

TB Hasanuddin
Anggota Komisi I DPR RI

Pertahanan. Penyebab kejadian harus diperiksa secara transparan dan menyeluruh,” ujar TB Hasanuddin, Minggu (27/9/2026).

Menurutnya, setiap calon peserta pelatihan Komcad harus menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan memenuhi persyaratan fisik yang ketat sebelum mengikuti rangkaian pendidikan dan latihan.

"Pemeriksaan kesehatan tidak boleh sekadar menjadi formalitas. Kondisi fisik setiap peserta harus benar-benar dipastikan mampu mengikuti latihan. Apabila dinyatakan tidak siap, peserta tidak perlu dipak-

sakan," tegasnya.

TB Hasanuddin juga meminta Kementerian Pertahanan mengevaluasi prosedur pemeriksaan kesehatan, standar keselamatan, intensitas latihan, kesiapan tenaga medis, serta mekanisme penanganan keadaan darurat selama pendidikan Komcad berlangsung.

"Keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama. Disiplin dalam latihan memang diperlukan, tetapi pelaksanaannya harus tetap mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kemampuan fisik masing-masing peserta," katanya.

Diketahui, seorang ASN Kementerian Ekonomi Kreatif yang mengikuti pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) ASN Gelombang II meninggal saat mengikuti gladi persiapan penutupan pendidikan Komcad ASN.

ASN bernama Vanreko Varkas Bagaskara (28) meninggal dunia pada 25 September 2026. Ia disebut meninggal dunia setelah terjatuh saat mengikuti gladi persiapan penutupan pendidikan Komcad ASN. ● (Egi)

Tegaskan OPM Harus Ditindak, Panglima TNI Sebut Penyelesaian Papua Butuh Kolaborasi

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah kelompok separatistis yang keberadaannya tidak bisa dibiarkan di wilayah Indonesia. Penegasan itu ia sampaikan usai menghadiri Festival Band Piala Panglima TNI 2026 di Lapangan Aldiron, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (27/9/2026).

Menurut Agus, gerakan separatistis tidak memiliki tempat di negara ini sehingga harus ditindak. Ia menyatakan hal tersebut secara tegas ketika ditemui awak media setelah acara tersebut berlangsung. Kendati demikian, orang nomor satu di institusi TNI itu mengingatkan bahwa persoalan Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan pendekatan militeristik. Ia menilai dibutuhkan kerja sama dari

berbagai pihak agar percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud. Agus mengaku sudah lama menyampaikan pandangan tersebut, yakni penyelesaian Papua harus dilakukan secara kolaboratif dan tidak bisa hanya dibebankan kepada TNI. Jika persoalan itu hanya dikotasikan sebagai tugas TNI semata, ia khawatir yang muncul justru kekerasan.

Agus kemudian memaparkan sejumlah langkah yang telah dijalankan TNI di Bumi Cenderawasih melalui operasi teritorial. Menurut dia, operasi tersebut dilaksanakan secara masif, mulai dari pembangunan rumah ibadah seperti gereja, pembuatan sumur bor air bersih oleh Angkatan Darat, hingga perbaikan sekolah-sekolah yang rusak. Selain itu, TNI juga memberikan pelayanan



kesehatan kepada warga di sana.

Tak berhenti di situ, Agus menyebut para prajuritnya turut terlibat dalam kegiatan pendidikan, termasuk mengajar di daerah-daerah terpencil. Ia menegaskan bahwa kehadiran TNI di pedalaman bertujuan membantu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pernyataan Panglima TNI ini menegaskan posisi pemerintah yang menolak segala bentuk gerakan separatisme, sekaligus

menunjukkan bahwa pendekatan yang dipakai tidak semata bersifat keamanan. Pembangunan infrastruktur dasar dan layanan publik di wilayah pedalaman menjadi bagian dari strategi tersebut. Festival Band Piala Panglima TNI 2026 sendiri menjadi ajang yang mempermudah personel TNI dalam kegiatan non-operasional. Usai acara itu, Agus menyempatkan diri menjawab pertanyaan wartawan mengenai sejumlah isu, termasuk perkembangan situasi di Papua. ● (Egi)

Kapolri Ajak Ulama dan Umara Bergandengan Tangan Rawat NKRI



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebut ulama memiliki peran penting sebagai lentera dan kompas yang mem-

berikan arah, nasihat, serta doa bagi bangsa dan negara Indonesia. Hal itu disampaikan Listyo Sigit dalam acara Ngaji Kebangsaan bersama K.H. Ahmad Bahaiddin Nursalim atau Gus

Baha di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Sabtu.

Menurut Listyo Sigit, peran ulama telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sejak masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, ulama bersama umara turut berkontribusi menjaga bangsa dan negara. "Ulama menjadi lentera dan kompas yang memberikan arah, nasihat, serta doa bagi bangsa dan negara," ucap Listyo Sigit.

Ia menilai peran tersebut tetap dibutuhkan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini. Terlebih, Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman sehingga perlu terus dijaga dan dikelola dengan baik agar menjadi kekuatan dalam mempertahankan persatuan.

Bagi Polri, bimbingan dan doa para ulama juga memiliki arti penting dalam mendukung personel menjalankan tugas. Dukungan tersebut dinilai membantu kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus memberikan perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat.

Listyo Sigit berharap kebersamaan antara ulama dan umara terus terjaga. Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk menjaga persatuan, merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. "Mari, umara dan ulama terus bergandengan tangan untuk menjaga persatuan, merawat NKRI, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur," ujarnya. ● (Egi)

JAKARTA | **Harian Merdeka**

KPK Temukan Dolar AS, Singapura, dan Emas Saat Geledah BPN Jatim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyita dolar Amerika Serikat (USD) dan dolar Singapura (SGD) serta perhiasan diduga emas se usai menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur pada Kamis (24/9).

“Ada lembaran USD dan SGD. Kemudian dalam pengeledahan di Kanwil BPN Jatim, penyidik juga mengamankan beberapa perhiasan diduga emas,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Minggu.

Budi menyampaikan pernyataan tersebut untuk menambah informasi yang telah disampaikan sebelumnya pada Jumat (25/9) terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pada tanggal tersebut, dia mengatakan KPK menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah se usai menggeledah Kanwil BPN Jatim.

Sementara itu, dia mengatakan penemuan dolar AS dan Singapura tersebut menjadi petunjuk bagi penyidik KPK untuk mendalami penerimaan mata uang asing di lingkungan Kanwil BPN Jatim.

“Penyidik akan dalam penerimaan tersebut untuk apa, siapa, dari mana, dan tentunya sejak kapan praktik itu dilakukan,”



katanya.

Terkait dengan penemuan dugaan emas, dia mengatakan penyidik KPK untuk sementara menduga nilainya mencapai puluhan juta rupiah, dan diduga diperoleh dari uang-uang yang dikumpulkan pihak-pihak terkait di lingkungan Kanwil BPN Jatim.

“Penyidik tentunya akan dalam maksud dan tujuan para oknum melakukan konversi uang ke dalam bentuk perhiasan tersebut,” ujar Budi.

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek

pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Sum-

marecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, dan Rizal Pahlevi selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.

Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry. Keempatnya diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Pada 17 September 2026, penyidik KPK menggeledah ruangan Lampri, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Asnaedi, serta ruangan direktorat terkait kasus tersebut. Namun, KPK menegaskan tidak menggeledah ruangan Nusron Wahid.

Pada 18 September 2026, KPK melanjutkan kegiatan pengeledahan dengan menggeledah kantor Summarecon di Jakarta, dan rumah Lampri. KPK pada 21 September 2026 menggeledah kantor Summarecon di Kabupaten Bogor. ● (Egi)

Bareskrim Selidiki Kasus Pekerja MBG Langkat, KP MBG Desak Usut Tuntas

JAKARTA |
Harian Merdeka

Penanganan laporan dugaan tindak pidana dalam kasus kecelakaan kerja yang menimpa pekerja MBG, Sri Rahayu Adiningsih, di Sei Siur, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, resmi memasuki tahap penyelidikan (lidik). Hari Jumat (24/9), Pelapor yang juga merupakan kakak kandung korban dipanggil dan diperiksa oleh Penyelidik Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan resmi terkait terjadinya kecelakaan kerja yang dialami oleh Adik Pelapor.

Komite Pemantau (KP)

MBG menyambut positif tindak lanjut cepat dari kepolisian. Pemanggilan pelapor menjadi sinyal kuat bahwa kasus pelanggaran norma jaminan sosial ini didalami secara serius guna mengusut unsur pidananya. Sebelumnya, pemeriksaan ketenagakerjaan oleh Disnaker setempat telah menghasilkan nota penetapan resmi. Nota tersebut memerintahkan pihak Pemberi Kerja (Yayasan) wajib menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh total. Meski pihak Yayasan sempat mengajukan keberatan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI

menolak keberatan tersebut dan memperkuat keputusan Disnaker.

Menurut KP MBG, fakta-fakta hukum tersebut harus diperiksa secara utuh untuk mengungkap rangkaian pertanggungjawaban dari tiap unsur yang terlibat.

“Kami mengapresiasi langkah kepolisian atas dimulainya penanganan perkara ini. Pemeriksaan harus ditarik ke arah penegakan norma perlindungan tenaga kerja. Pemberi kerja memiliki kewajiban mutlak terkait jaminan sosial, upah, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.



Bongkar seluruh mata rantai tanggung jawab para pihak dalam perkara ini,” tegas Achmad Ismail, Koordinator KP MBG yang akrab disapa Ais.

Ais menambahkan, keberadaan nota penetapan Disnaker serta surat keputusan Kemnaker RI membuat perkara ini memiliki basis dokumen

resmi yang sangat kuat dan bernilai tinggi untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

Di sisi lain, Maruli Tua Rajagukguk selaku Tim Hukum KP MBG menilai dokumen pemeriksaan ketenagakerjaan merupakan pilar utama dalam konstruksi perkara ini.

● (Egi)

Polda Banten Tangkap Dua Pelaku Tambang Ilegal di Kronjo Tangerang



TANGERANG |
Harian Merdeka

Polisi membongkar aktivitas penambangan tanah urug ilegal di Kampung Cimentul, Desa Bakung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam kasus tersebut, dua orang berinisial RD dan DL ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus ini diungkap Unit IV Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Banten setelah menerima laporan pada 31 Juli 2026. Polisi kemudian melakukan pengecekan dan penyelidikan terhadap dugaan aktivitas penambangan tanpa izin di lokasi tersebut.

“Kasus ini berawal dari Laporan Polisi tanggal 31 Juli Tahun 2026, penyidik Unit IV Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Banten melaksanakan pengecekan yang dilakukan terhadap aktivitas penambangan tanah urug,” kata Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea

dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (26/09/2026).

Hasil penyelidikan menunjukkan aktivitas penambangan berlangsung pada 27 hingga 31 Juli 2026. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan satu unit alat berat jenis excavator.

Polisi kemudian melakukan pendalaman hingga mengidentifikasi dua orang yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut. Keduanya masing-masing berinisial RD dan DL.

Dari hasil pemeriksaan, aktivitas penambangan tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tanah urug yang diambil kemudian dijual kepada pembeli.

“Tanah urug hasil penambangan tersebut diketahui dijual secara eceran dengan harga Rp250.000 per ritase menggunakan dump truck Colt Diesel berkapasitas sekitar lima meter kubik,” ungkap Maruli.

Atas perbuatannya, kedua

tersangka dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

“Keduanya terancam dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun serta denda maksimal kategori IV sebesar Rp 200 juta,” terangnya.

Polda Banten mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin. Masyarakat juga diminta segera melapor jika menemukan kegiatan pertambangan yang diduga tidak mengantongi izin.

“Masyarakat yang menemukan adanya aktivitas pertambangan yang diduga tidak memiliki izin dapat segera melaporkannya melalui call center 110 atau mendatangi kantor kepolisian terdekat,” pungkasnya.

● (Egi)



Polres Serang Tetapkan Tersangka Kasus Kekerasan Seksual Anak Yatim Piatu

SERANG | **Harian Merdeka**

Polres Serang melalui Satuan Reserse Kriminal memastikan penanganan perkara dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak yatim piatu terus berjalan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum.

Hal tersebut disampaikan menyusul adanya pemberitaan di media sosial yang mempertanyakan perkembangan penanganan perkara tersebut.

Kasatreskrim Polres Serang AKP Andi Kurniady, S.T.K., S.I.K., mengatakan bahwa sejak laporan diterima, penyidik telah melakukan serangkaian langkah penanganan, mulai dari pengecekan tempat kejadian perkara, permohonan Visum Et Repertum, penerbitan dan penyampaian SP2HP kepada pelapor, hingga pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

“Kami memastikan laporan tersebut ditangani secara serius dan profesional. Setiap tahapan dilakukan berdasarkan prosedur hukum serta fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik,” ujar AKP Andi.

Ia menjelaskan, setelah dilakukan pendalaman terhadap keterangan saksi dan alat bukti, penyidik Satreskrim Polres Serang telah melaksanakan gelar perkara peningkatan penanganan perkara ke tahap penyidikan pada Jumat, 25 September 2026.

Selanjutnya, pada Sabtu, 26 September 2026, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi secara pro justitia guna melengkapi proses penyidikan.

Kemudian pada Minggu, 27 September 2026, penyidik kembali melaksanakan gelar perkara dalam rangka penetapan tersangka.

“Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik telah menetapkan tersangka dalam perkara ini. Proses penyidikan selanjutnya terus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas AKP Andi.

AKP Andi menambahkan, pihaknya memahami perhatian dan kekhawatiran masyarakat terhadap perkara tersebut, terlebih menyangkut korban yang masih berusia anak. ● (Egi)

Cerita Acha Septriasa Sempat Blackout

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Aktis Acha Septriasa membagikan pengalaman mendebarkan usai menuntaskan lari maraton perdanya sejauh 42 kilometer di Sydney, Australia. Ia mengaku sempat mengalami blackout setibanya di kediaman pribadinya.

Kondisi tersebut dialaminya saat sedang berada di rumah berdua bersama sang buah hati, Bridgia Kalina Kharisma. Tubuhnya ambruk lantaran mengalami kelelahan yang luar biasa setelah mengerahkan seluruh tenaganya di lintasan lari.

"Kemarin pas lagi aku tinggal sama Bri berdua selesai maraton, aku ingat banget aku sempat blackout gitu," kata Acha Septriasa saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, kemarin.

Ibu satu anak itu menduga penurunan kondisi fisiknya dipicu oleh kombinasi cuaca, dehidrasi, serta terlambatnya asupan nutrisi setelah menyelesaikan rute panjang tersebut. Faktor-faktor tersebut membuat staminanya langsung merosot tajam.

"Jadinya karena memang mungkin baru pertama kali lari 42 kilo. Gak tahu gitu rasanya badan mungkin ada heartstroke-nya juga, mungkin badan juga ngerasanya kurang minum dan juga gak langsung makan protein, jadinya lemah banget waktu itu. Akhirnya aku ya gitu, blackout di depan kamar, jatuh," terangnya.

Momen tersebut menjadi pengalaman yang sangat membekas bagi Acha Septriasa. Di satu sisi ia merasa bangga berhasil menembus batas kemampuan fisiknya, namun di sisi lain ia harus menghadapi konsekuensi kelelahan berat hingga jatuh pingsan.

"Itu pengalaman yang seru banget, lucu, tapi kayak di satu sisi sedih juga karena aduh ini selesaiin lari panjang dapat prestasi, tapi sudahannya blackout," bebernya. ● (dth)

DPR Dorong PMI Pulang Tak Kembali ke Luar Negeri, Penguatan Usaha Produktif Jadi Kunci

JAKARRTA |
Harian Merdeka

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul mendorong pemerintah memperkuat program pemberdayaan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) setelah mereka kembali ke tanah air dan daerah asal.

Menurut Zainul, perlindungan terhadap PMI tidak seharusnya berhenti pada proses pemulangan. Pemerintah perlu memastikan para PMI mendapatkan pendampingan berkelanjutan agar mampu mengelola penghasilan dan pengalaman yang diperoleh selama bekerja di luar negeri menjadi modal untuk membangun usaha produktif.

“Saya kira BP2MI bisa melakukan kegiatan sosialisasi, penguatan, pendampingan kepada para PMI yang bekerja ke luar negeri,” kata Zainul dalam keterangan diterima **Harian Merdeka** Senin (28/9/2026).

Ia menilai pendampingan tersebut penting, bukan hanya untuk memastikan PMI memahami dan menaati prosedur penempatan, tetapi juga membantu mereka memanfaatkan hasil kerja di luar negeri untuk menciptakan sumber penghasilan baru di daerah asal.

“Selain pendampingan agar mereka taat prosedur, juga pendampingan agar mereka bisa memanfaatkan hasil dari mereka bekerja di luar negeri untuk menjadi satu kegiatan usaha yang produktif,” imbuhnya.

Zainul mengatakan, PMI yang telah menyelesaikan masa kerja di luar negeri perlu didorong mengembangkan usaha dengan memanfaatkan modal maupun pengalaman yang mereka miliki.

Menurutnya, usaha produktif yang dibangun setelah kepulangan dapat menjadi pintu masuk bagi penguatan ekonomi keluarga sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di daerah asal PMI.

Selain itu, keberadaan usaha tersebut diharapkan dapat memberikan pilihan bagi PMI sehingga mereka tidak sepenuhnya bergantung pada pekerjaan di luar negeri.

Karena itu, Zainul mendorong agar pemerintah membangun sistem pendampingan PMI secara berkelanjutan. Pendampingan tersebut idealnya dilakukan sejak sebelum keberangkatan, selama PMI bekerja di luar negeri, hingga setelah mereka kembali ke Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan PMI sekaligus memastikan hasil kerja mereka di luar negeri dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga. ● (Agus)



PLN UP3 Banten Selatan Gandeng Kejari Lebak-Pandeglang

LEBAK | **Harian Merdeka**

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banten Selatan memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kejaksaan Negeri Lebak dan Kejaksaan Negeri Pandeglang, Jumat (25/9).

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kerja sama antara PLN dengan Kejaksaan, khususnya dalam bidang hukum dan tata kelola perusahaan. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PLN secara optimal, sekaligus memberikan kepastian serta pendampingan hukum dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan.

Melalui kerja sama ini, PLN UP3 Banten Selatan bersama Kejaksaan Negeri Lebak dan Kejaksaan Negeri Pandeglang berkomitmen membangun koordinasi yang semakin erat, baik dalam aspek bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun upaya pencegahan potensi permasalahan hukum. Kolaborasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya PLN dalam memperkuat penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan memastikan seluruh proses bisnis berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manager PLN UP3 Banten Selatan, Tri Haryanto, mengatakan kerja sama tersebut menjadi ruang untuk membangun komunikasi yang lebih terarah antara PLN dan Kejaksaan dalam menjalankan tugas masing-masing.

“Penandatanganan Memorandum of Understand-



ing (MoU) ini merupakan bentuk komitmen PLN UP3 Banten Selatan untuk terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan Kejaksaan. Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan penguatan dari sisi hukum, sekaligus mendukung PLN dalam menjalankan proses bisnis secara prudent, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Tri dalam keterangannya.

Sementara itu, General Manager PLN UID Banten, Tonny Bellamy, menilai koordinasi dengan aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menjaga kualitas tata kelola perusahaan. Menurutnya, proses bisnis yang dijalankan dengan kepatuhan dan integritas akan memberikan fondasi yang lebih kuat bagi PLN dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan kepada pelanggan.

“Pelayanan kelistrikan yang baik tidak hanya selesai secara operasional, tetapi juga memenuhi aspek kepatuhan, integritas, dan akuntabilitas. Di sinilah koordinasi dengan Kejaksaan menjadi penting, agar setiap langkah yang kami ambil memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertang-

gungjawabkan,” ungkap Tonny.

Ia menambahkan, tata kelola perusahaan bukan hanya menjadi bagian dari proses internal, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana PLN menjalankan tanggung jawabnya kepada pelanggan dan para pemangku kepentingan.

“Yang juga penting dari kerja sama ini adalah membangun komunikasi dan koordinasi sejak awal. Dengan begitu, berbagai hal yang berkaitan dengan aspek hukum dapat dibahas lebih dini, sehingga PLN bisa menjalankan kegiatan operasional dengan lebih tertib dan tetap fokus memberikan layanan terbaik kepada pelanggan,” tambah Tonny.

Penandatanganan MoU tersebut menjadi awal bagi koordinasi yang berkelanjutan antara PLN UP3 Banten Selatan dengan Kejaksaan Negeri Lebak dan Kejaksaan Negeri Pandeglang. Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung PLN UID Banten menjalankan proses bisnis secara tertib dan sesuai ketentuan, sehingga perusahaan dapat tetap fokus memberikan pelayanan kelistrikan kepada pelanggan di wilayah Lebak dan Pandeglang. ● (Egi)

Rokok Ilegal Mengintai Warung Kecil, Kejari Jepara Ungkap Potensi Kerugian Negara Rp165 Miliar



JEPARA | **Harian Merdeka**

Peredaran rokok ilegal menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Jepara. Toko dan warung kecil dinilai menjadi salah satu sasaran empuk penjual maupun sales rokok ilegal untuk menitipkan produknya dengan iming-iming harga murah.

Hal tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Cukai yang digelar Pemerintah Kabupaten Jepara di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Jumat (11/9).

Kegiatan tersebut diikuti tokoh masyarakat serta pemilik toko dan warung.

Hadir Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jepara Budhi Sulistyawan yang mewakili Sekda Jepara Ary Bachtiar, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jepara Achmad Za'im Wahyudi, Pelaksana Pemeriksa Bea Cukai Kudus Candra Dewo Pamungkas, serta Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Jepara Ola Ranti Dewi.

Budhi menilai pemilik toko dan warung memiliki peran penting dalam memutus rantai peredaran rokok ilegal di tingkat masyarakat.

"Toko dan warung kecil menjadi sasaran penjual dan sales rokok ilegal untuk menitipkan produk dengan iming-iming harga murah," ujar Budhi.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur keuntungan dari penjualan rokok ilegal. Selain merugikan negara, perdagangan produk tanpa cukai resmi juga dapat membawa konsekuensi hukum pidana.

Sementara itu, Achmad Za'im Wahyudi memaparkan ancaman pidana terhadap pihak yang memproduksi maupun mengedarkan produk dengan cukai ilegal.

Ia mengungkapkan, Kejari Jepara tengah menangani kasus dugaan produksi pita cukai palsu di wilayah Kalinyamatan. Dalam perkara tersebut, potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp165 miliar.

"Potensi kerugian negara mencapai Rp165 miliar. Ini kasus serius," tegasnya. ● (Agus)

Himpunan Wiraswasta Peringati Maulid Nabi 1448 H, Gubernur Banten Pesankan Empat Sifat Teladan Rasulullah



TANGSEL |
Harian Merdeka

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak semestinya berhenti pada sekadar seremoni keagamaan. Gubernur Banten Andara Soni menyampaikan, momentum maulid harus menjadi kesempatan bagi umat untuk memperkuat silaturahmi, menambah ilmu, serta menumbuhkan semangat meneladani akhlak Rasulullah.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur Banten Andara Soni saat menghadiri Tablig Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Lapangan Persijat, Kampung Jati, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Sabtu (26/9/2026) malam.

Acara ini dipadati ribuan warga sejak sore dan turut menghadirkan Ustaz Das'ad Latif sebagai penceramah. Dalam kesempatan terse-

but, Gubernur Banten hadir didampingi Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni.

Di hadapan warga, Gubernur Andara mengajak masyarakat menjadikan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai sarana untuk semakin mengenal, mencintai, sekaligus meneladani sifat-sifat mulia Rasulullah.

"Semoga pertemuan yang penuh keberkahan ini menjadi momentum untuk mempererat ikatan, menambah ilmu, serta makin menguatkan semangat kita untuk terus menebarkan kebaikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Gubernur Andara.

Ia menyebutkan empat sifat nabi yang patut menjadi teladan, yakni sidik, amanah, tablig, dan fatanah. Menurutnya, nilai-nilai tersebut sangat relevan untuk terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat

saat ini.

"Maulid juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat ukhuwah islamiyah (persaudaraan sesama umat Islam), ukhuwah basyariah (persaudaraan kemanusiaan), dan ukhuwah wataniah (persaudaraan kebangsaan)," tuturnya.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur Andara menyampaikan apresiasi kepada panitia dan Dewan Kemakmuran Musala Al-Ikhlas Kampung Jati Buaran yang telah sukses menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ia juga mengajak warga untuk terus memakmurkan tempat ibadah di lingkungan masing-masing.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, serta Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan. ● (Egi)

PAKAR HUKUM.....

JAKARTA | *Harian Merdeka* - Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola nikel dinilai sebagai terobosan hukum yang signifikan.

Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti Azmi Syahputra menegaskan penetapan ini penting untuk menguji apakah kejahatan tersebut merupakan perbuatan individu semata atau tindakan sistematis demi keuntungan perusahaan.

Penyidik telah mengantongi

konstruksi perkara yang saling berhubungan, mulai dari ekspor nikel tanpa Domestic Market Obligation (DMO), manipulasi hasil uji kadar, rekomendasi ekspor tanpa RKAB, hingga dugaan suap kepada pejabat.

“Perluasan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan dan penetapan korporasi sebagai tersangka menjadi signifikan untuk melihat rentetan secara konkrit apakah tindak pidana tersebut merupakan perbuatan individual semata atau dilakukan dalam kepentingan dan untuk keuntungan korporasi,” ujar Azmi.

Ia mengingatkan agar struktur badan hukum tidak dijadikan tameng untuk memutus rantai pidana jika keuntungan kejahatan justru mengalir ke perusahaan.

Terkait nilai kerugian negara sebesar Rp 401,65 miliar yang dikeluarkan BPK, Azmi mengapresiasi langkah penyidik yang telah menahan para tersangka. “Penahanan dapat dibaca sebagai bentuk keseriusan penyidik Kejaksaan Agung dalam mengamankan proses penyidikan, termasuk negara harus tegas kepada pihak-pihak yang melakukan tindak pidana dalam berusaha,” tegasnya.

Azmi juga mendorong Kejaksaan untuk mengusut seluruh rantai penyimpangan di birokrasi minerba agar tidak sekadar menumbalkan beberapa pelaku.

“Penyidik perlu membongkar bukan hanya siapa yang menerima uang, tetapi juga siapa yang meminta, mengatur, memfasilitasi, menerbitkan, memverifikasi, mengetahui, dan membiarkan penyimpangan terjadi, termasuk titik rawan dalam celah birokrasi minerba. Perbaiki segera sistem tata kelola minerba harus terus dilakukan dan diawasi,” pungkasnya. ● (Egi)

KUNJUNGI BANGKALAN

Bangkalan | *Harian Merdeka* - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menjamin pemenuhan kebutuhan dasar serta membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu.

Pernyataan strategis tersebut disampaikan Budiman saat menggelar kunjungan kerja ke Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Amanah di Desa Basanah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Jumat (25/9/2026).

Dalam rangkaian agenda peninjauan tersebut, Budiman berdialog langsung dengan warga setempat serta jajaran pengelola

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) se-Kabupaten Bangkalan untuk menyerap aspirasi riil masyarakat.

Mantan aktivis itu menilai, penangan angka kemiskinan di Indonesia tidak boleh hanya berpatokan pada indikator statistik di atas kertas, melainkan wajib menyentuh realitas kehidupan harian warga di tingkat tapak.

Pemerintah berkomitmen hadir secara nyata untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarga kurang mampu, mulai dari jaminan kecukupan pangan harian hingga ketersediaan fasilitas pendukung belajar anak.

“Target Pak Prabowo sebagai Presiden adalah memastikan dapurnya warga miskin tetap mengepul, lampunya tetap me-

nyala, Wi-Fi tetap berjalan, anak-anak tetap belajar dan berangkat sekolah,” tegas Budiman.

Selain menjamin kebutuhan dasar harian masyarakat, negara juga memiliki tanggung jawab moral untuk membukakan jalan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu agar dapat meraih masa depan yang lebih baik.

Budiman secara khusus menyoroti pentingnya jaminan akses pendidikan hingga jenjang Perguruan Tinggi Negeri (PTN) bagi anak-anak berprestasi yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah.

“Kalau ada anak-anak pintar dan punya kemampuan, mereka harus mendapatkan kesempatan untuk masuk perguruan tinggi negeri,” ujarnya di hadapan para

tokoh dan warga Madura.

Mengenai arah pembangunan nasional, Budiman menekankan bahwa pemerintah tidak boleh sekadar mengumbar pencapaian angka pertumbuhan ekonomi tanpa memedulikan kelompok masyarakat yang masih tertinggal. Oleh karena itu, BP Taskin menjadikan prinsip nobody left behind atau tidak ada satu pun warga yang tertinggal sebagai landasan utama dalam merancang seluruh program pengentasan kemiskinan.

“Kita tidak sekadar akan take off, tetapi juga harus memastikan mereka yang masih tertinggal di landasan bisa ikut bergerak maju. Tidak boleh ada satu orang pun yang tertinggal,” tutur Budiman. ● (Egi)

SISWI ISAN.....

Laporan perkara tersebut diterima Polres Tangerang Selatan pada Selasa, 22 September 2026. Penanganan kasus kini dilakukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Tangerang Selatan.

Kasubsi PIDM Humas Polres Tangerang Selatan Ipda Yudhi membenarkan adanya laporan tersebut. Yudi mengatakan, hingga Jumat, 25 September 2026, penyidik masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan korban dan sejumlah saksi. “Penyidik masih mengumpulkan keterangan serta fakta untuk mengungkap perkara tersebut,” kata Yudi kepada *Harian Merdeka*, Senin (28/9/2026).

Berdasarkan laporan keluarga korban, pihak yang dilaporkan merupakan tenaga pengajar berinisial NAA. Sementara korban disebut masih berusia 13 tahun.

Kuasa hukum korban, Muhammad Fadhli, mengatakan dugaan peristiwa tersebut disebut berlangsung dalam rentang waktu cukup panjang, yakni sejak korban duduk di kelas 4 SD hingga memasuki jenjang SMP.

Namun, seluruh dugaan tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan belum menjadi kesimpulan hukum.

Laporan polisi perkara ini tercatat dengan nomor LP/B/3019/IX/2026/SPKT/POLRES-TANGERANGSELATAN/POLDA-METROJAYA.

Menurut Fadhli, kasus tersebut mulai diketahui keluarga pada awal September 2026 setelah korban menceritakan pengalaman yang dialaminya kepada pelatih taekwondo.

Keluarga kemudian membawa korban menjalani pemeriksaan psikologis sebelum akhirnya mel-

aporkan perkara tersebut kepada kepolisian.

Sejumlah bukti pendukung juga telah diserahkan kepada penyidik, di antaranya tangkapan layar percakapan serta dokumen hasil pemeriksaan psikologis.

Kuasa hukum korban turut menyampaikan dugaan adanya pendekatan tertentu terhadap korban yang disebut sebagai child grooming. Namun, klaim tersebut masih merupakan keterangan dari pihak korban dan menjadi bagian dari materi yang tengah dialami penyidik.

Pemkot Tangsel Panggil Pihak Sekolah

Pemerintah Kota Tangerang Selatan turut merespons laporan tersebut. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memanggil pihak sekolah untuk meminta

penjelasan.

Pemkot Tangsel juga melakukan koordinasi dengan kementerian terkait karena sekolah yang dimaksud merupakan sekolah internasional sehingga terdapat kewenangan lintas instansi.

Hingga berita ini disusun, pihak sekolah maupun tenaga pengajar yang dilaporkan belum memberikan keterangan resmi kepada media terkait perkara tersebut.

Polisi masih mendalami keterangan korban, saksi, serta bukti-bukti yang telah diserahkan untuk menentukan fakta dan perkembangan hukum kasus.

Karena korban masih di bawah umur, identitasnya tidak dicantumkan demi perlindungan anak. Perkara ini juga masih berada pada tahap penyelidikan, sehingga asas praduga tak bersalah tetap berlaku terhadap pihak yang dilaporkan. ● (Agus)

INDONESIA VS MALAYSIA:

BEREBUT 3 POIN KRUSIAL

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Timnas Indonesia akan melawan Timnas Malaysia dalam lanjutan FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda tertinggal tipis dari Harimau Malaya dalam catatan head-to-head.

Laga ini akan digelar pada hari ini, Senin (28/9/2026) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jad-

wal kickoff direncanakan akan terselenggara pada pukul 19.30 WIB. Kedua tim bakal saling sikut-sikutan demi bisa finis teratas. Hanya juara grup (Grup A dan Grup B) yang lanjut ke final, tim finis kedua akan rebutkan tempat ketiga.

Dalam catatan pertemuan, Indonesia dan Malaysia sudah berhadapan sebanyak 85 kali. Hasilnya, Indonesia menang 33 kali, imbang 18 kali, dan kalah 34 kali.

Haye Tak Sabar Lawan Malaysia Gelandang Timnas Indonesia, Thom Haye mengaku tak sabar segera menjalani laga yang layaknya

derby itu. Haye menyebut bahwa Indonesia vs Malaysia sebagai laga besar. Seluruh anggota Tim Merah Putih disebut amat menantikan pertandingan ini.

"Sebagai seorang pesepak bola, Anda selalu menantikan pertandingan besar seperti ini. Semua orang tahu sejarah dan skala persaingan antara Indonesia dan Malaysia. Setelah mengamankan tiga poin krusial hari ini, seluruh tim sangat antusias dan siap untuk pertandingan berikutnya," kata Haye dikutip dari situs FIFA.

Thom Haye menegaskan kondisi fisik pemain Indonesia dalam kondisi terbaik. Dia juga menyatakan ada kemungkinan John Herd-

man akan melakukan rotasi.

"Secara fisik, sejauh ini kami berada dalam kondisi yang baik. Jadwal sangat padat dengan waktu istirahat yang singkat antarpertandingan, jadi sang pelatih memastikan setiap pemain tetap bugar.

Mungkin akan ada beberapa ro-

tasi pada pertandingan-pertandingan mendatang agar tim tetap bugar dan sehat," ujar Haye. ●

(dts)



terbit setiap sore Senin s/d Sabtu

HARIAN **MERDEKA**

aspirasi rakyat

Langganan ePaper...

Dapatkan berita terkini setiap sore langsung di perangkatmu.

Hanya **Rp30.000/bulan** Hubungin **Alan Oskar : +62 895-2285-1963**

